

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Jelaskan Pengendapan Anggaran pada Program Bantuan Pendidikan

Komisi Kesejahteraan Rakyat DPRD menemukan penyaluran dana KJP yang tak tepat sasaran.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, *Nahdiana*, membenarkan adanya pengendapan anggaran dalam program bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Pengendapan itu terjadi karena penerima bantuan tak mencairkan dana yang sudah dimasukkan ke rekening penampungan (*escrow*).

Anggaran KJP dan KJMU yang mengendap di rekening penampungan itu nilainya mencapai Rp 1,13 miliar. Pengendapan ini menjadi catatan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta atas laporan keuangan pemerintahan DKI Jakarta 2018.

BPK DKI Jakarta menyerahkan laporan hasil pemeriksaan itu pada Rabu pekan lalu. Pemerintah DKI kembali meraih opini "wajar tanpa pengecualian (WTP)". Sedangkan perma-

salahan yang ditemukan dalam laporan keuangan 2018 menjadi catatan untuk diperbaiki oleh pemerintah DKI.

Nahdiana menjelaskan, ada beberapa alasan yang membuat penerima KJP dan KJMU tak mencairkan dana yang sudah masuk rekening. Salah satunya adalah mereka telah pindah ke sekolah lain di luar Jakarta. "Karena pindah, mereka tak mengambil buku tabungan dan kartu ATM (anjuan tunai mandiri)," katanya, Senin lalu. "Tiga kali pemanggilan, mereka tidak hadir. Jadi, uangnya sudah masuk ke rekening, cuma belum dimanfaatkan oleh mereka."

Nahdiana menambahkan, UPT siap membenarkan pengendapan dana KJP dan KJMU yang menjadi catatan BPK itu. "Kalau memang (penerima bantuan) sudah pindah, dana akan dikembalikan ke kas daerah," katanya.

Kepala Satuan Pelaksana Personal UPT P4OP Dinas Pendidikan DKI Jakarta, *Jhones Albert*, menuturkan penyebab lain pengendapan dana KJP ialah siswa yang masuk program itu sudah tidak berhak lagi untuk me-

nerima bantuan. Walhasil, anggaran yang sudah dialokasikan dikembalikan ke rekening penampungan.

Adapun untuk pengendapan dana KJMU, kata *Jhones*, disebabkan siswa penerima bantuan yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi telah memperoleh beasiswa lain, seperti Bidikmisi. "Kan enggak boleh dobel (beasiswa)," ujarnya. Dana KJP yang masih mengendap di rekening penampungan nilainya sebesar Rp 166 juta dan dana KJMU sebesar Rp 973 juta.

Jhones mengklaim tidak ada dampak bagi siswa akibat pengendapan dana program pendidikan itu. Temuan BPK sejauh ini hanya menyoroti akuntabilitas dari pencatatan anggaran KJP dan KJMU: "Harusnya dana (KJP dan KJMU) itu segera dikembalikan ke kas daerah biar bisa dimanfaatkan untuk program lain," katanya.

Wakil Ketua Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, *Ramly Muhammad*, menilai pengendapan itu terjadi karena data siswa penerima KJP dan KJMU

banyak yang bermasalah. "Datanya itu tidak valid," katanya.

Ramly mencontohkan, ada siswa penerima bantuan yang sudah mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM tapi tidak bisa mengambil dana bantuan karena kartunya bermasalah. Akibatnya, uang yang sudah masuk rekening tidak bisa dicairkan. "Hal seperti itu banyak. Padahal uangnya sudah ada di dalam (rekening itu)," ujar politikus Golkar tersebut.

Selain itu, *Ramly* mendapat laporan perihal penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Misalnya saja ada anak yatim, yang ibunya hanya berjualan pisang goreng, tidak mendapatkan KJP. Sementara di sisi lain, ada anak yang masih memiliki ayah dan ibu bekerja serta memiliki sepeda motor pribadi malah memperoleh KJP. Untuk itu, *Ramly* berharap pemerintah bisa segera memperbaiki penerapan program bantuan pendidikan ini. ●

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Jelaskan Pengendapan Anggaran pada Program Bantuan Pendidikan

Penerima Bantuan Pendidikan

PEMERINTAH DKI Jakarta setiap tahun menaikkan anggaran untuk program bantuan pendidikan. Namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta menemukan ada pengendapan anggaran pada program ini. Sedangkan Komisi Kesejahteraan DPRD Jakarta menilai pengendapan itu terjadi karena penyaluran bantuan tidak tepat sasaran.

Berikut ini rincian nilai anggaran program bantuan pendidikan.

Tahun	Jumlah Penerima KJP	Realisasi Anggaran
2014	573.089	Rp 670.712.760.000
2015	561.408	Rp 2.079.621.450.000
2016	692.002	Rp 2.484.516.475.000
2017	778.058	Rp 3.174.562.200.000
2018	905.919	Rp 3.896.627.400.000

Tahun	Jumlah Penerima KJMU	Realisasi Anggaran
2016	594	Rp 5.346.000.000
2017	2.191	Rp 26.019.000.000
2018	4.542	Rp 62.946.000.000

SUMBER: DINAS PENDIDIKAN DKI

Warga mengecek saldo Kartu Jakarta Pintar di sebuah gerai ATM di Pasar Tebet Timur, Jakarta.